

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,
KOMITMEN PIMPINAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**

Oleh:

**Rahmad Bintang Shabri Asroel
Pembimbing : Yessi Mutia Basri dan Susilatri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : bintangshabri@yahoo.com*

*The Influence of Accountability, Environmental Uncertainty, Leader Commitment,
and Internal Control on Transparency of Financial Reporting (Study on Riau
Province Government)*

ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the influence accountability, environmental uncertainty, leader commitment, and internal control on transparency of financial reporting. This research is expected to help the government in order to improve the transparency of financial reporting increasingly better in the future. The sample used in this research are the echelon IV and accounting staff in Riau Province Government. Data was collected through questionnaire survey method. The data was collected by using 96 questionnaires that spread to 32 SKPD (regional work units and only 80 questionnaire could be analyzed. Data were analyzed by using multiple regression (multiple regression) and moderate regression (Moderate Regression Analysis-MRA) with the help of a computer program SPSS version 17.0. The results showed that accountability, environmental uncertainty, leader commitment, and internal control had significant influence on transparency of financial reporting.

Keywords: accountability, environmental uncertainty, leader commitment, internal control, and transparency of financial reporting.

PENDAHULUAN

Melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mulai diberlakukan pembagian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Namun, UU otonomi daerah ini mendapatkan banyak kritikan dan

masukannya untuk lebih disempurnakan lagi. Dengan terjadinya *judicial review* maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Semenjak perubahan itu, perkembangan otonomi daerah di tiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, salah satu hal terpenting yaitu dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka, untuk kemudian disampaikan secara tepat waktu dan tentu saja disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut harus melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir dan sebelumnya akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan profesional. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Sukhemi, 2011).

Menurut Mardiasmo (2009:19) salah satu karakteristik *good governance* yang digunakan dalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) yaitu adanya transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Perhatian terhadap isu transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin seringnya media massa memuat berita mengenai hal tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini, yaitu: 1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, dan 2) Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aliyah, 2012).

Pemerintah daerah tidak menutup mata akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Pemerintah sangat menyadari dampak negatif yang akan ditimbulkan jika tidak adanya transparansi publik ini, yaitu dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, khususnya di lingkungan organisasi sektor publik (Ridha, 2012).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 ini, salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian yang wajib diciptakan dan dipelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut diantaranya sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi laporan keuangan daerah. Terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah akan

menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, dapat dilihat dari seberapa besar SKPD mampu melaksanakan elemen-elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas. Dalam rangka menciptakan *good governance* dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (*accountable*) (Adha, 2014).

Menurut Mardiasmo (2009:20), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan pemerintah. *Concepts Statement* No.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-

hasil operasi, membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Scott yang dikutip Mulyana (2006) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Di dalam suatu organisasi pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang dapat menjalankan roda pemerintahan. Sumber daya manusia ini yang akan menjadi penggerak kelancaran jalannya kegiatan usaha. Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kinerja pemerintah telah mengarah ke *good governance*. Salah satu caranya yaitu dengan menciptakan transparansi laporan keuangan setiap SKPD kepada publik. Komitmen pimpinan dalam organisasi atau pemerintahan

menentukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bidang organisasi, oleh karena itu komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerjaan terhadap organisasi. Dengan adanya komitmen, organisasi dapat berkembang searah dan seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi, dengan kata lain komitmen pimpinan dapat mempengaruhi motivasi individu untuk menentukan suatu hal.

Untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan juga dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh pegawai pemerintah daerah. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku akan dapat terwujud bila diikuti oleh komitmen yang tinggi dari para pimpinan organisasi. Sistem manajemen yang baik, yaitu apabila SKPD memiliki staf yang handal dan kompeten di bidangnya masing-masing, akan berdampak pada tercapainya transparansi pelaporan keuangan sehingga standar profesionalisme pada SKPD dapat terpenuhi.

Keterbukaan informasi merupakan fenomena global yang telah dikenal hampir di seluruh negara. Termasuk di Indonesia. Keterbukaan informasi publik menjadi isu strategis dalam upaya menggapai *good governance* yang merupakan cita-cita bersama masyarakat Indonesia. Semangat mendorong terwujudnya *good governance* melalui keterbukaan informasi publik, disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang mengatur secara khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam

konteks anggaran, lahirnya UU KIP menjadi angin segar bagi keterbukaan pengelolaan anggaran. Karena UU tersebut menjamin dan memandu masyarakat untuk meminta informasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah (APBN/APBD).

Namun, fakta di lapangan jauh berbeda dengan semangat *good governance* melalui keterbukaan informasi khususnya pengelolaan anggaran yang digemborkan pemerintah. Lahirnya UU KIP enam tahun silam belum berdampak besar terhadap keterbukaan informasi di Indonesia. Rendahnya tingkat masyarakat “melek” anggaran (*budgetliteracy*), akibat dipengaruhi oleh rezim tertutup selama ini. Bahkan hingga saat ini masih banyak aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang menganggap informasi anggaran sebagai “rahasia negara” yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat luas. Hal itu mengasumsikan, pengelolaan anggaran adalah urusan pemerintah, sedangkan masyarakat dianggap tidak perlu mengetahui dan memahaminya.

Saat ini masih belum begitu banyak penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan, khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ridha dan Basuki (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan komitmen manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Sihaloho (2013) dan Asmidawati (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Ridha dan Basuki (2012), hasil penelitian Sihaloho (2013) dan Asmidawati (2013) juga menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Maka, peneliti tidak meneliti kembali variabel tekanan eksternal.

Peneliti juga menambah 2 (dua) variabel independen lain dalam penelitiannya, yaitu melihat bagaimana pengendalian internal dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan khususnya di pemerintahan daerah. Karena pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada banyak pihak yang terkait. Pertanggungjawaban ini dituangkan melalui laporan keuangan yang tidak

hanya dapat diperoleh oleh DPRD tetapi juga oleh publik, dalam hal ini yaitu masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak lain yang membutuhkan informasi. Informasi keuangan seharusnya dapat diperoleh dengan mudah melalui internet, surat kabar, stasiun televisi, dan media lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 2) Apakah terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 3) Apakah terdapat pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 4) Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2) Untuk menguji seberapa besar pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Untuk menguji seberapa besar pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 4) Untuk menguji seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

TELAAH PUSTAKA

Transparansi Pelaporan Keuangan

Perlu diketahui bahwa laporan keuangan dan pelaporan

keuangan memiliki pengertian yang berbeda. Laporan keuangan (*financial statements*) adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, *earnings*, *current cost*, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Yadiati, 2007:52).

Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2005:20) adalah sebagai berikut: "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut."

Mahsun (2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian Lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan (Tjahjadi, 2011).

Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya. Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Fardian, 2014). Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi

adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Fardian, 2014).

Komitmen Pimpinan

Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu (Aranya & Ferris, 1984 dalam Pasaribu, 2009).

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Mathis dan Jackson mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Pengendalian Internal

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Pada tahun 1992, COSO yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk

mengurangi kejadian tersebut, telah menerbitkan *Internal Control Framework* yang didalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengendalian mereka.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Mulyana, 2006). Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Toha, 2007).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh

subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi diyakini memberikan kepercayaan yang lebih dari publik sehingga harapan masyarakat akan adanya keterbukaan dari pemerintah dapat terwujud.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi operasional organisasi (Cahyono, 2008). Jika diterapkan dalam sistem pengawasan akuntansi, ketidakpastian lingkungan diukur dengan melihat pengaruhnya terhadap penggunaan informasi dan karakteristik-karakteristik informasi. Laporan keuangan merupakan informasi yang paling utama dalam kegiatan sektor publik. Jika dalam aktivitas sehari-hari para pegawai dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, bisa jadi ada hal yang ditutupi dalam hal pelaporan keuangan daerah dan pengaruhnya akan terlihat dari transparansi pelaporan keuangan tersebut.

Ketidakpastian lingkungan yaitu suatu keadaan dimana organisasi tidak yakin dengan cara berproses atau melakukan sesuatu baik itu sistem ataupun peraturan terkait. Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah sistem dalam menciptakan hasil laporan keuangan yang transparan yang merupakan tuntutan dari semua pihak yang memiliki

kepentingan yang berbeda-beda. Ketidakpastian lingkungan menciptakan ketidakmengertian sebuah organisasi dalam melakukan sesuatu, dalam konteks ini bagaimana cara menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Organisasi akan merespon hal ini dengan cara meniru organisasi yang telah dianggap sukses dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Contohnya dengan cara melakukan studi banding atau memakai jasa konsultan dari organisasi yang telah dianggap berhasil tersebut.

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting serta bagaimana caranya seseorang memimpin hingga dapat membawa kelompok kerja ke arah keberhasilan yang maksimal. (Kartono, 2010) mendefinisikan kepemimpinan sebagai bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Dalam hal ini pemimpin berperan sebagai perencana (*planner*), pelayan (*steward*), dan guru (*teacher*) dengan cara mengarahkan dan mengembangkan bawahan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitasnya dalam bekerja agar tercipta kinerja yang tinggi.

Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemimpin bukan sekedar dapat mempengaruhi pemanfaatan

semua sumber daya yang tersedia untuk implementasi kebijakan, tapi jauh melampaui itu juga mempunyai *power* yang dapat digunakan untuk memaksa sumber daya yang lain.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Indra Bastian (2006) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.

SKPD sebagai level pelaksana pemerintah daerah mengemban tugas untuk dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tujuan organisasi yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi dapat tercapai. Dalam menjalankan proses pengendalian di dalam tubuh pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan mampu terbuka dan transparan dalam melakukan setiap kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD di Pemerintahan Provinsi Riau. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah seluruh Eselon IV dan bagian akuntansi di SKPD Provinsi Riau. Adapun teknik pengambilan sampel, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik ini karena pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengisian angket atau kuesioner dan studi pustaka.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS 17.0*. Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji

asumsi klasik (uji multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas), uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel transparansi pelaporan keuangan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012). Variabel akuntabilitas diukur dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh Liper Siregar (2011). Variabel ketidakpastian lingkungan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012). Sedangkan variabel Komitmen pimpinan ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012). Variabel pengendalian internal menggunakan instrumen yang dikembangkan Fitri Zalni (2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebar pada 32 SKPD yang berada di Provinsi Riau. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 96 responden. Jumlah kuisisioner yang dapat dianalisis sejumlah 80 kuisisioner atau sebesar 83,33% dari 96 kuisisioner yang telah disebar. Dari kuisisioner yang dikembalikan, terdapat 15 kuisisioner yang tidak kembali dan 1 kuisisioner yang tidak lengkap.

Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai r hitung dari item pernyataan untuk semua variabel lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r

tabel). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, komitmen pimpinan, pengendalian internal, dan transparansi pelaporan keuangan adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Didapatkan hasil bahwa besarnya *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik variabel akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, komitmen pimpinan, pengendalian internal dan transparansi pelaporan keuangan lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan *reliable*. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Total Cronbach alpha variabel
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,60	0,695
Akuntabilitas	0,60	0,921
Ketidakpastian Lingkungan	0,60	0,808
Komitmen Pimpinan	0,60	0,823
Pengendalian Internal	0,60	0,898

Sumber : Data Olahan, 2015

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari hasil perhitungan model regresi memenuhi asumsi normalitas, bebas dari multikolinearitas, bebas dari autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama(H₁)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,992 pada tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas sebesar 3,021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Dengan demikian, t_{hitung} 3,021 > t_{tabel} 1,992 dengan signifikansi 0,003 < 0,05. Jadi dapat dikatakan H_0_1 ditolak dan H_{a1} diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,992 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 3,619 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian, t_{hitung} 3,619 > t_{tabel} 1,992 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Jadi dapat dikatakan H_0_2 ditolak dan H_{a2} diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,992 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel komitmen pimpinan sebesar 3,360 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian, t_{hitung} 3,360 > t_{tabel} 1,992 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Jadi dapat dikatakan H_0_3 ditolak dan H_{a3} diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H₄)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,992 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel pengendalian internal sebesar 3,061 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Dengan demikian, 3,061 > t_{tabel} 1,986 dengan signifikansi 0,003 <

0,05. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.888. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal, hanya dapat menjelaskan variabel Transparansi Pelaporan Keuangan sebesar 88,8%. Sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis Pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pelaksanaan yang telah sesuai dengan UU yang berlaku akan menjadikan laporan keuangan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian transparansi pengelolaan keuangan juga akan semakin baik.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan suatu instansi khususnya pada SKPD Provinsi Riau maka penerapan transparansi pelaporan keuangan juga semakin baik.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen pimpinan yang kuat. Dalam pelaporan keuangan, pimpinan SKPD tidak hanya melaporkan informasi yang hanya bersifat positif saja bagi SKPD, seperti berupa capaian yang telah diraih, akan tetapi juga berupa ketidaktercapaian. Dalam jangka panjang, penerapan transparansi pelaporan keuangan membutuhkan komitmen dari pimpinan SKPD untuk terus menyesuaikan praktiknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, SKPD Provinsi Riau sebagai pemerintah daerah telah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah penelitian ini menerapkan metode survei yang dilaksanakan dengan pernyataan tertulis. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dari responden dengan keadaan sesungguhnya. Selain itu, objek penelitian hanya terdistribusi pada sektor pemerintahan Kota Pekanbaru sehingga mempengaruhi kemampuan penelitian ini untuk digeneralisasikan pada sektor dan wilayah yang lebih luas.

Saran

Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap transparansi pelaporan keuangan sehingga efektif bagi organisasi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Wendi. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neaca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012*.

Robbins SP, dan Judge. 2007.
Perilaku Organisasi. Jakarta:
Salemba Empat.

Sukhemi. 2011. Pengaruh Tingkat
Pengungkapan Laporan
Keuangan terhadap
Transparansi Keuangan Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta.
Akmenika UPY, Volume 8,
2011.

Toha, Suherman. 2007. Penelitian
Masalah Hukum tentang
Penerapan Good Corporate
Governance Pada Dunia
Usaha. *Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen
Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI.*

Yadiati, Dr Winwin. 2007. *Teori
Akuntansi Suatu Pengantar*.
Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.

*Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah.*

*Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 1 Paragraf
ke 7. Revisi 2009.*